

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan UMKM merupakan salah satu komponen utama perekonomian Indonesia khususnya pada daerah-daerah tertentu . Sektor usaha mikro ,kecil dan menengah saat ini tengah berkembang pesat dan telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian indonesia. UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian nasional. Hal ini menunjukan betapa keberadaan UMKM memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia (Dayanti et al., 2020).

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi Dan UKM, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Namun, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

UMKM di Indonesia saat ini mengalami peningkatan pesat , salah satunya di daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan . Saat, Ini sekitar

18.000 UMKM yang telah tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bone. Dari banyaknya UMKM yang telah terdaftar tidak semua mengalami keberhasilan dalam usahanya. Kegagalan ini diperkirakan terjadi karena beberapa faktor yang di antaranya yaitu kurangnya literasi keuangan , sikap keuangan , dan inklusi keuangan.

Berbagai pelaku UMKM ada yang memahami tentang pengelolaan keuangan dan ada yang tidak memahami pengelolaan keuangan. UMKM yang memahami keuangan cenderung mengetahui arah dan tujuan bisnisnya sehingga UMKM yang mereka jalani berkembang dengan cepat, dan UMKM yang tidak atau belum memahami mengenai keuangan dengan baik acenderung lebih rawan untuk mengalami kerugian yang bersifat terus – menerus dikarenakan tidak bisa memahami keuangan pada usahanya. Banyak pelaku usaha UMKM yang tidak memahami fakta bahwa pentingnya pengelolaan keuangan agar bisnisnya bisa berkembang. Misalnya , memahami cara berinvestasi , menabung dan mengelola dana dengan benar agar bisnis tetap berjalan dengan lancar tanpa terjadi kerugian (Hanasri et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan signifikan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital sebagai media untuk memperluas jangkauan pasar. Penggunaan platfrom bisnis online menjadi strategi utama bagi banyak pelaku UMKM agar produk dan layanan mereka dikenal lebih luas . Namun, meskipun banyak yang mulai berbisnis di berbagai bidang ,masih banyak

pelaku usaha yang kurang memahami pengelolaan keuangan secara efektif . pengetahuan keuangan baik sangat penting untuk membantu pengusaha mengatur arus kas, investasi, dan pengeluaran dengan bijak , sehingga bisnis dapat tumbuh dan berkelanjutan . Studi terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang tepat dapat meningkatkan peluang keberhasilan UMKM hingga 40% dalam lima tahun terakhir (Hanasri et al., 2023). Selain itu sikap bijak dan disiplin dalam mengelola keuangan juga berkontribusi signifikan dalam menghadapi tantangan pasar dan persaingan global (Anistia, Suhaibah, 2024) . Dengan demikian , penguasaan manajemen keuangan menjadi faktor kunci dalam mendorong perkembangan dan daya saing UMKM di era saat ini .

Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi kinerja keuangan yang perlu diketahui oleh pelaku bisnis UMKM yaitu : Faktor pertama yang dibutuhkan oleh pelaku bisnis online adalah literasi keuangan yang dimana nantinya literasi keuangan ini akan mengatur bagaimana cara mengelola dan berinvestasi kepada pebisnis lain. Literasi keuangan merupakan hal penting bagi pengelolaan keuangan. Dengan literasi keuangan yang baik , pelaku UMKM diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola modal dan merencanakan pengeluaran. Pengetahuan ini sangat penting bagi pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner yang sering terlibat dalam manajemen biaya yang kompleks , seperti pengadaan bahan baku, operasional , dan pengelolaan pendapatan dari penjualan.

Faktor kedua yaitu sikap keuangan , sikap keuangan juga termasuk faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar dimulai dari menerapkan sikap keuangan yang baik dan benar juga sehingga keputusan yang di ambil akan tepat (Nuryana & Rahmawati, 2020). Dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM yang dapat memahami situasi keuangan dan memiliki kemampuan mengelola dananya dengan baik dapat dikatakan unggul dan mampu mengembangkan usahanya karena pelaku UMKM mampu mengelola dananya,

Selain literasi keuangan dan sikap keuangan, inklusi keuangan juga saat diperlukan oleh pelaku UMKM dalam mengelola keuangan mereka (Septiani & Wuryani, 2020). Inklusi keuangan. Adalah hak setiap orang termasuk pelaku UMKM memiliki akses dan layanan penuh dari Lembaga keuangan dan layanan keuangan formal seperti bank, BPR, koperasi secara tepat waktu dan terjangkau biayanya . Pelaku usaha dalam menangani pengelolaan keuangan akan terbantu dengan adanya inklusi keuangan , mulai dari dimensi akses, dimesi penggunaan. dan dimensi kualitas (Assanniyah & Setyorini, 2024). Rendahnya inklusi keuangan membuat banyak UMKM terjebak pada sumber pembiayaan informal dengan bunga tinggi dan tanpa pencatatan yang jelas, sehingga menghambat perkembangan usaha. Dalam hal ini sangat penting untuk memahami faktor tersebut.

Berdasarkan hasil dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) yang diterbitkan (OJK) Otoritas jasa keuangan tahun 2019 (OJK.go.id, 2019), tingkat literasi keuangan masih rendah dengan rata –

rata hanya mencapai 38,03% pada 2019, yang dimana dipengaruhi oleh faktor geografis dan perbedaan tingkat Pendidikan di beberapa wilayah, termasuk di Kabupten Bone. Banyak pelaku usaha belum memahami dasar pembukuan , pengelolaan utang , dan perencanaan keuangan. Selanjutnya sikap keuangan dan Inklusi keuangan yang dimana sikap keuangan di Kabupaten Bone cenderung dipengaruhi oleh budaya, Pendidikan , dan pengalaman . Beberapa UMKM di wilayah ini cenderung tidak melakukan pencatatan keuangan secara teratur , pengelolaan dana , dana pengambilan keputusan finansial. Sedangkan untuk Inklusi keuangan di Kabupaten Bone pada tahun 2021 mencapai 80,12 %, namun UMKM di Kabupaten Bone masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal , kredit , dan asuransi . Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi dan ketidaktahuan mengenai produk keuangan yang sesuai dengan UMKM.

Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Omset
2020	77	25.755.500.003
2021	163	60.487.850.001
2022	377	48.987.600.002
2023	807	46.917.416.873
2024	534	37.400.409.990

Tabel 1.1 Data UMKM Tanete Riattang

Sumber : Dinas koperasi dan UMKM kabupaten Bone.

Data data tabel di atas menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2020 hingga 2023 , dengan peningkatan yang terbesar terjadi pada tahun 2023 yaitu 807 UMKM. Penurunan pada tahun 2024 menjadi 534 UMKM yang dimana dipengaruhi oleh beberapa faktor , seperti , persaingan usaha yang ketat, keterbatasan modal , dan kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan yang baik. Sedangkan untuk Omset UMKM di Kabupaten Bone mengalami lonjakan yang besar pada tahun 2021 , yang mencerminkan peningkatan yang signifikan . Namun , setelah 2021 omzet mengalami penurunan meskipun jumlah UMKM meningkat . Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang kurang baik bisa menjadi faktor penurunan omzet .

Salah satu dari tantangan tersebut adalah akses pembiayaan yang merupakan bagian literasi keuangan . Sebagian besar UMKM merasa usahanya berjalan dengan baik dan normal. Tetapi kenyataannya banyak UMKM tidak berkembang dengan baik bahkan mengalami kerugian. Masalah utama yang menghambat pertumbuhan UMKM adalah kemampuan terbatas dalam perencanaan keuangan , kurangnya disiplin pencatatan , dan rendahnya kesadaran akan pentingnya sikap keuangan yang bijak .Menurut (Ardila et al., 2022), hal ini tentu saja menyulitkan pelaku usaha baik dalam menghitung dan mengetahui secara hasil dan usahanya dan akibatnya menghambat perkembangan usaha dari sisi penambahan modal.Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan UMKM tidak hanya bergantung pada kualitas produk , tetapi juga pada kemampuan manjerial di bidang keuangan . Dampak dari fenomena

tersebut mengakibatkan Usaha mikro , kecil , dan menengah (UMKM) dituntut untuk selalu berkembang dan melakukan inovasi agar dapat meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian , literasi keuangan , sikap keuangan, dan inklusi keuangan dinilai menjadi faktor penting keberhasilan UMKM. Mengingat rendahnya pengetahuan mendalam bagi tiga faktor tersebut kepada pelaku UMKM di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang. Maka, peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Tanete Riattang Kabupaten Bone.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang , pokok pembahasan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pelaku usaha UMKM Tanete Riattang, Kabupaten Bone?
2. Apakah sikap keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pelaku usaha UMKM Tanete Riattang, Kabupaten Bone?
3. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pelaku usaha UMKM Tanete Riattang, Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan pelaku usaha UMKM Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap keuangan terhadap kinerja keuangan pelaku usaha UMKM Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pelaku usaha UMKM Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang keuangan khususnya pada literasi keuangan, sikap keuangan, dan inklusi keuangan pada pengelolaan keuangan . Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pelaku UMKM

Bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pentingnya literasi, pengetahuan, inklusi keuangan agar dapat mencapai pengelolaan keuangan yang baik dan meningkatkan profitabilitas usaha UMKM.

b. Bagi Penulis

Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait pentingnya literasi keuangan, pengetahuan keuangan, dan inklusi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Manajemen Keuangan

a. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang berkaitan dengan pengolahan keuangan yang pada dasarnya dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Manajemen keuangan memiliki peranan penting dalam perkembangan sebuah perusahaan. Manajemen keuangan adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang penting, dengan mempelajari ilmu manajemen keuangan, seseorang akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam pekerjaan dan perkembangan karirnya. Menurut Griffin (2021), manajemen merupakan serangkaian kegiatan (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, keuangan, fisik, dan informasi) dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Banyak karakteristik yang berkontribusi pada kompleksitas dan ketidakpastian manajemen berasal dari lingkungan di mana organisasi berfungsi.

Dengan kata lain manajemen keuangan merupakan manajemen (pengelolaan) mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Sutrisno

(2020:3) manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Menurut Abdul Halim dan Sarwoko (2019:3) manajemen keuangan adalah pengelolaan uang dalam suatu organisasi, apakah itu organisasi pemerintah, sekolah, rumah sakit, bank, perusahaan dan lain-lain. Menurut Agus Sartono (2020:1) Manajemen keuangan adalah sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembayaran investasi atau pembelanjaan secara efisien.

Menurut D. Agus Harijto dan Martono (2019:4) manajemen keuangan adalah aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengolah asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah ilmu mendapatkan dana dan mengelola dana perusahaan supaya produktif.

b. Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Kombinasi dari

ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan. Ketiga keputusan keuangan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan laba yaitu, sebagai berikut:

1) Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Bentuk, macam, dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan dimasa depan. Keuntungan dimasa depan yang diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu investasi akan mengandung risiko atau ketidak pastian. Risiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan.

2) Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.

3) Keputusan Dividen

Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini

merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham.

c. Tujuan Manajemen Keuangan

Dalam sebuah perusahaan, memaksimalkan laba seringkali merupakan tujuan yang tepat untuk dicapai. Secara konvensional, tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang sebanyak- banyaknya, atau laba yang maksimal. Menurut Irham Fahmi (2020:4) tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali dan memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Menurut Dian Wijayanto (2019:233), tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan dan keuntungan. Memaksimalkan keuntungan sering disebut sebagai pendekatan tradisional dan sempit dari tujuan manajemen keuangan. Setiap perusahaan memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan merupakan indikasi dari efektivitas dan efisiensi bisnis. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Atau dengan kata lain, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai (value).

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut Rivai

dan Sagala (2013), kinerja usaha di definisikan sebagai sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, akuntabilitas manajemen dan sebagainya. Kinerja atau performansi merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Kinerja yang baik disemua sektor baik keuangan, produksi, distribusi, maupun pemasaran merupakan syarat mutlak bagi UMKM untuk bisa terus hidup. Dengan kinerja yang baik pula bagi UMKM diharapkan akan semakin kokoh jadi tulang punggung perekonomian dan akan semakin berperan penting dalam perekonomian Nasional. Kinerja keuangan adalah hasil kerja usaha atau ukuran yang menunjukkan seberapa baik usaha dalam menggunakan asset dan menghasilkan pendapatan, kinerja keuangan juga menggambarkan tentang kondisi keuangan usaha. Rasio yang paling sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan Usaha adalah ROE. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan usaha untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh usaha. Semakin tinggi nilai ROE menunjukkan semakin efisien usaha menggunakan modal sendiri menghasilkan laba. (karisma et al., 2025)

Kinerja keuangan adalah salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya

(Mukhlis et al., 2023). Umumnya kinerja keuangan dijadikan sebagai dasar untuk mengukur sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan digunakan sebagai media pengukuran subjektif yang menggambarkan efektivitas penggunaan aset oleh suatu perusahaan dalam mengelola bisnisnya dalam meningkatkan pendapatan . Dalam menganalisis suatu kinerja keuangan, analisisnya membutuhkan suatu konsep atau aspek yang dapat menggambarkan data keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan suatu prestasi yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu dalam menggambarkan tingkat keunggulan perusahaan tersebut. Hal ini dapat menjadi dasar dalam penilaian kondisi kinerja keuangan berdasarkan analisis laporan keuangan.

3. Literasi Keuangan

Salah satu komponen manajemen keuangan adalah literasi keuangan, yang juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menilai konsep keuangan serta menerapkan tanggung jawab keuangan secara tepat (Meilani & Sukmawati, 2023). Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menganalisis, mengelola, dan mengomunikasikan situasi keuangan mereka, yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka. Literasi keuangan mencakup keterampilan dan kemampuan seseorang dalam membuat keputusan pengelolaan keuangan, membahas keuangan, merencanakan masa depan, dan merespons secara kompeten aktivitas kehidupan yang memengaruhi keputusan keuangan sehari-hari (Santiara & Sinarwati, 2023).

Dalam penelitian *Chen* dan *Volpe* mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan mengelola keuangan. Mereka menemukan bahwa tingkat literasi yang lebih tinggi menghasilkan perilaku keuangan yang bijaksana dan pengelolaan keuangan yang efektif. Menurut (Dahlia, 2020), indikator literasi keuangan meliputi:

- a. Pengetahuan, yang merupakan aspek krusial yang harus dimiliki seseorang dalam konsep literasi keuangan untuk mengelola keuangan secara efektif. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- b. Kemampuan, yang dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk membuat keputusan keuangan yang tepat ketika seseorang memiliki tingkat literasi yang tinggi. Pengambilan keputusan merupakan salah satu elemen terpenting dalam konteks literasi keuangan.
- c. Sikap, dalam pengelolaan keuangan pribadi, mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi sumber dana, memenuhi kewajiban, memahami cara membuka rekening di lembaga keuangan Islam, mengajukan pembiayaan, dan merencanakan keuangan pribadi untuk masa depan.
- d. Kepercayaan diri, karena tidak semua orang mampu meningkatkan kepercayaan diri mereka ketika merencanakan kebutuhan jangka panjang.

Literasi keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam hal mengelola keuangan individu agar mampu membuat keputusan keuangan yang tepat dan terhindar dari masalah keuangan. Masalah keuangan bukan hanya

berasal dari rendahnya penghasilan, tetapi dapat muncul karena adanya ketidaktepatan dalam hal mengatur keuangan. Namun pada hakikatnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu mengatur keuangan usahanya dengan tepat sehingga mengakibatkan kerugian dalam usahanya (Pohan, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi empat tingkatan, yaitu mempunyai literasi yang baik (*well literate*), mempunyai literasi yang cukup (*sufficient literate*), mempunyai literasi yang kurang (*less literate*), dan tidak mempunyai literasi (*not literate*) (OJK.go.id, 2019). Tingkat literasi keuangan seseorang yang tinggi atau *well literate* akan mempengaruhi seseorang lebih cermat dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dengan cermat perlu dilakukan karena dapat membantu UMKM untuk mengambil keputusan pada usahanya. Berdasarkan sejumlah hasil penelitian terdahulu dinyatakan literasi keuangan dinyatakan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan UMKM.

Tujuan literasi keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah untuk meningkatkan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka. Literasi keuangan membantu UMKM mengelola keuangan mereka secara lebih efektif. Hal ini memungkinkan pengelolaan arus kas yang lebih terstruktur dengan memahami konsep-konsep keuangan dasar seperti penganggaran dan pencatatan transaksi. Dengan memahami konsep-konsep keuangan fundamental ini, individu juga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Memenuhi persyaratan kredit dan mengelola pinjaman secara

bijaksana lebih memungkinkan bagi UMKM yang memiliki pemahaman yang kuat tentang aspek keuangan.

4. Sikap Keuangan

Sikap keuangan adalah sebagai pengontrol diri dalam menggunakan dan mengelola keuangan. Sikap keuangan mengacu pada perspektif individu terhadap keuangan, dilihat melalui lensa kemampuan psikologis mereka untuk menjalankan pengendalian diri atas pengeluaran keuangan, untuk membuat rencana keuangan, untuk menetapkan anggaran, dan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat (Nisa et al., 2020). Sikap keuangan berfungsi sebagai pengatur diri dalam memanfaatkan dan mengelola keuangannya (Nisa et al., 2020).

Sikap keuangan mengacu pada persepsi psikologis seseorang mengenai kemampuannya mengendalikan pengeluaran, merencanakan keuangan, dan menyusun anggaran, serta tindakannya dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan sikap positif umumnya lebih proaktif dalam mencari informasi dan menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik (Nugroho, 2022). Sebaliknya, sikap negatif, seperti ketidakpedulian terhadap pengelolaan keuangan atau keengganan untuk merencanakan masa depan, dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk dan berpotensi mengancam keberlanjutan usaha. Sikap merupakan aspek krusial dalam mempelajari perilaku, karena tindakan individu didasarkan pada persepsi mereka terhadap realitas. Sikap keuangan dapat didefinisikan sebagai

kondisi pikiran, opini, dan evaluasi terkait keuangan yang tercermin dalam sikap seseorang. Terdapat indikator sikap keuangan, yang meliputi orientasi terhadap keuangan pribadi, filosofi utang, pengelolaan uang, dan penilaian keuangan pribadi. Oleh karena itu, sikap keuangan yang dimiliki seseorang akan membantu mereka dalam menentukan sikap dan perilaku terkait masalah keuangan, termasuk pengelolaan keuangan, penganggaran pribadi, dan bagaimana individu mengambil keputusan terkait masalah keuangan yang muncul (Nugroho, 2022)

Elemen-elemen yang memengaruhi sikap moneter, seperti yang dinyatakan oleh (Herawati & Suwendra, 2020)

a. Pola pikir dan kebiasaan pengelolaan keuangan

Sikap pelaku UMKM terhadap pengelolaan keuangan. Sesuatu seperti; faktor lain, seperti cara berpikir saat menabung, melacak transaksi, dan memprioritaskan investas, juga memengaruhi kemampuan dalam menjaga stabilitas keuangan.

b. Keyakinan terhadap manfaat perencanaan keuangan

Para pelaku UMKM menyakini perencanaan keuangan membawa manfaat memiliki sikap positif terhadap penyusunan anggaran, pengelolaan arus kas, dan pengalokasian dana untuk masa depan usahanya.

c. Pengaruh sosial dan budaya lokal

Nilai-nilai sosial dan budaya lokal, seperti kepercayaan masyarakat terhadap kredit bank dan preferensi terhadap tabungan informal, dapat

mempengaruhi sikap pelaku UMKM terhadap keputusan keuangan.

d. Pengalaman dan literasi keuangan

Pengalaman dalam pengelolaan keuangan, baik melalui praktik langsung maupun pelatihan formal/informal, dapat menumbuhkan sikap positif terhadap pentingnya literasi keuangan bagi keberlanjutan perusahaan.

5. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat. Inklusi keuangan diukur menggunakan indikator penggunaan (*usage*) produk dan/atau layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan diukur menggunakan indikator penggunaan (*usage*) produk dan/atau layanan jasa keuangan (OJK.go.id, 2024)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2021), inklusi keuangan mengacu pada tersedianya akses terhadap lembaga, produk, dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, layanan keuangan harus mudah diakses oleh seluruh anggota masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, sekaligus memastikan bahwa individu mendapatkan perlindungan saat mengakses layanan tersebut. Tingkat inklusi keuangan yang tinggi akan memungkinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan keuangan dengan lebih baik, seperti memperoleh

modal untuk mengembangkan usahanya. Namun, pelaku usaha seringkali menghadapi kendala, terutama kesulitan dalam mengakses layanan keuangan akibat ketatnya persyaratan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan, yang mengakibatkan rendahnya tingkat inklusi keuangan di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lebih lanjut, rendahnya tingkat inklusi keuangan juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang layanan keuangan.

Raju Maulaa (Maulana & Triyonowati, 2024), dalam penelitiannya yang berjudul *Financial Attitudes Toward Financial Management Behavior with Financial Inclusion as an Intermediary Variable Among Generation Z in Riau*, menjelaskan bahwa inklusi keuangan mencakup penyediaan akses terhadap layanan keuangan, termasuk tabungan, pinjaman, asuransi, dan transaksi pembayaran. Bank Indonesia (2014) mengklarifikasi bahwa inklusi keuangan adalah serangkaian upaya yang ditujukan untuk menghilangkan berbagai hambatan, baik yang terkait dengan harga maupun yang tidak terkait dengan harga, sehingga masyarakat, termasuk yang berpenghasilan rendah, dapat mengakses layanan keuangan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di suatu negara adalah ketersediaan atau akses, yang menilai kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan formal dalam hal aksesibilitas fisik dan biaya; penggunaan, yang mengevaluasi kemampuan aktual untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan (termasuk keteraturan, frekuensi, dan durasi penggunaan), dan kualitas, yang menilai

apakah atribut produk dan layanan memenuhi standar yang diharapkan.
Bahasa Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), kebijakan keuangan inklusif mencakup pilar dan landasan SNKI, didukung oleh koordinasi antar kementerian/lembaga atau lembaga terkait, dan dilengkapi oleh aksi keuangan inklusif. Berikut adalah pilar dan landasan SNKI:

- a. Pilar Edukasi Keuangan Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, produk dan layanan keuangan, termasuk fitur, manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.
- b. Pilar Hak Kepemilikan Masyarakat Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kredit dari lembaga keuangan formal.
- c. Pilar Fasilitas Intermediasi Keuangan dan Saluran Distribusi Pilar Fasilitas intermediasi keuangan dan saluran distribusi bertujuan untuk memperluas jangkauan.

Dalam Buku Saku Keuangan Inklusif (2014) diuraikan beberapa tujuan penyelenggaraan inklusi keuangan, antara lain:

- a. Terwujudnya Inklusi Keuangan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan,

- b. Tersedianya produk dan layanan dari lembaga keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan,
- d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan,
- e. Memperkuat hubungan sinergis antarbank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan nonbank, dan terakhir
- f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh masyarakat melalui sistem layanan Keuangan Inklusif, yang pertama adalah akses; kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh pinjaman modal secara otomatis akan membuka peluang usaha yang lebih luas atau dapat pula dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi bagi pelaku usaha tersebut. Manfaat kedua adalah terbukanya jaringan ke sektor keuangan formal sehingga masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, dapat mengakses berbagai jenis pinjaman usaha dan juga memanfaatkan produk perbankan dan asuransi dengan persyaratan yang relatif mudah. Manfaat ketiga adalah kemudahan mengakses layanan keuangan formal akan mengurangi pertumbuhan pemberi pinjaman informal atau rentenir di masyarakat, yang biasanya mengenakan suku bunga tinggi. Manfaat terakhir adalah rekening yang dibuka oleh masyarakat di lembaga keuangan formal selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan penting dan untuk menjalankan bisnis (Wahyuni et al., 2019).

6. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

UMKM merupakan kegiatan usaha yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan lapangan kerja, dan menyediakan berbagai pelayanan ekonomi kepada masyarakat, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pembangunan nasional (Hastuti & dkk, 2021). Usaha mikro merupakan kegiatan yang mampu memperluas kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Koperasi dan UKM Republik Indonesia mengklasifikasikan jenis usaha ke dalam beberapa kategori berdasarkan ukuran usaha, antara lain usaha mikro dan usaha kecil, menengah. Dibawah ini penjelasan masing-masing kategori:

a. Usaha Mikro

Omset tahunan maksimum perusahaan jenis ini adalah Rp.300 Juta, Usaha mikro biasanya mempunyai modal awal yang terbatas dan tidak mempunyai tenaga kerja yang banyak. Contoh usaha mikro adalah usaha jasa seperti foto copi jasa elektronik, atau usaha kecil lainnya yang ukuran usahanya relatif kecil.

b. Usaha Kecil

Omset tahunan perusahaan jenis ini melebihi Rp. 300 juta dan hingga mencapai Rp 2, 5 Miliar. Usaha kecil biasanya memiliki modal lebih besar dan karyawan lebih banyak di bandingkan usaha mikro.

c. Usaha Menengah

Omset tahunan perusahaan ini melebihi Rp 2,5miliar dan mencapai hingga Rp 50 miliar. Perusahaan skala menengah biasanya mempunyai modal yang lebih besar dan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan skala kecil dan menengah.

Adapun peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari:

- a. Kedudukannya sebagai pemain dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
- b. Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
- c. Pameran penting dalam pembangunan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

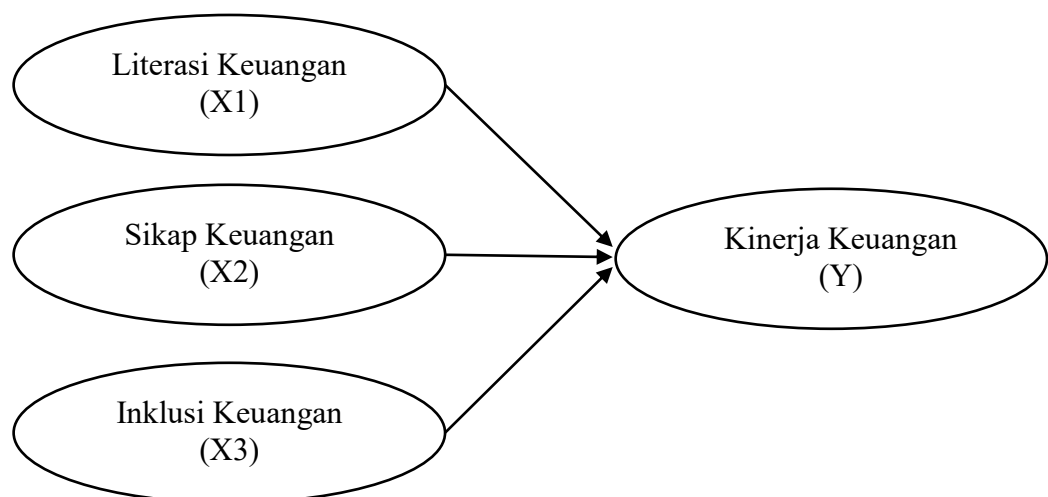
No	Nama dan Tahun	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	David Karisma, Samsul Bachri, dan Halim Usman (2025)	Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pada usaha mikro kecil menengah di kecamatan masamba	Variabel Independen : Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Variabel dependen : Kinerja Keuangan	Hasil uji T dan F menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada UMKM kecamatan masamba dan Inklusi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan pada UMKM kecamatan

No	Nama dan Tahun	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Masamba.
2.	Fatimah Azzahro dan D. Ririn Indriastusi (2025)	Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan pada UMKM Wisata Kuliner Pasar Dhoplang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri	Variabel independen: (a) Literasi keuangan (b) Sikap keuangan (c) Pengelolaan keuangan Variabel dependen: Kinerja keuangan	Berdasarkan dari hasil penelitian literasi keuangan, sikap keuangan, dan pengelolaan keuangan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan kinerja finansial UMKM di lokasi tersebut.
3.	Sintawati Mita Kusumaningrum , Gendro Wiyano , dan Alfiatul Maulida (2023)	Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Sikap Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kapanewon Godean , Kabupaten Sleman	Variabel independen: (d) Literasi Keuangan Inklusi Keuangan (e) Sikap Keuangan Variabel dependen: Pengelolaan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan literasi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan, inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, dan sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan

No	Nama dan Tahun	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Putri Ardhia Regita Ingkiriwang, Ivonne S. Saerang , dan Victoria N. Untu (2025)	Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan umkm di kota manado	Variabel independen: (f) Literasi Keuangan Inklusi Keuangan Varibel dependen: Kinerja Keuangan Keuangan	Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa secara parsial dan simultan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan UMKM yang ada di Kota Manado.
5.	Asad Idzharul Haq & Ridwan (2025)	Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Sikap Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Pada UMKM di Kabupaten Bandung	Variabel independen: - Literasi Keuangan - Inklusi Keuangan - Sikap Keuangan Variabel dependen: Pengelolaan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Secara parsial, inklusi keuangan dan sikap keuangan berpengaruh signifikan, sedangkan literasi keuangan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. secara simultan, literasi keuangan, inklusi keuangan, dan sikap keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan.
6.	Amelia (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, dan Kepribadian	Variabel independen : - Literasi Keuangan - Sikap Keuangan - Kepribadian Variabel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian berpengaruh

No	Nama dan Tahun	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan pada Pelaku UMKM Kelurahan Gedong, Jakarta Timur	dependen : Pengelolaan Keuangan	positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau proporsi yang belum dibuktikan perihal faktor atau fenomena yang menjadi minat peneliti. Menurut sugiyono (2023:99), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang melalui pengumpulan data. Berdasarkan uraian teori, maka rumusan hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut :

1. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kinerja keuangan pada pelaku usaha UMKM.
2. Sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kinerja keuangan pada pelaku usaha UMKM.
3. Inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kinerja keuangan pada pelaku usaha UMKM.